

Dampak Perubahan Pranata Sosial Terhadap Kesejahteraan Petani (Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi)

Rizki Budi Utami

Institut Pertanian Bogor, Indonesia

Email : rb.utami@gmail.com

Abstrak

Article Info:

Submitted:

10-04-2025

Final Revised:

17-04-25

Accepted:

19-04-2025

Published:

22-04-2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak perubahan pranata sosial pertanian akibat konversi tanaman komoditi dari nanas ke kelapa sawit terhadap kesejahteraan petani di Desa Kumpay, Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi untuk data kualitatif, serta kuesioner untuk data kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi tanaman nanas menjadi kelapa sawit telah mengubah pranata sosial pertanian yang mengakibatkan penurunan kesempatan kerja, pola pekerjaan, serta hubungan sosial antar warga. Akibatnya, banyak petani dan keluarga yang sebelumnya mengandalkan tanaman nanas kehilangan mata pencaharian dan mengalami penurunan kesejahteraan, baik secara moril maupun materiil. Perubahan ini juga berdampak pada meningkatnya kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan antar warga, yang memecah komunitas dan mengurangi rasa gotong royong. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adil dalam pengelolaan lahan dan konversi komoditi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pengambilalihan; Lahan; Konversi; Komoditi; Pranata; Kesejahteraan

Abstract

This study aims to examine the impact of changes in agricultural social institutions caused by the conversion of commodity crops from pineapple to oil palm on the welfare of farmers in Kumpay Village, Subang. The research uses a mixed-methods approach (qualitative and quantitative), with data collection techniques including in-depth interviews, observations, documentary studies, and questionnaires for quantitative data. The collected data were analyzed using qualitative analysis and statistical techniques. The results show that the conversion of pineapple crops to oil palm has altered agricultural social institutions, resulting in reduced job opportunities, changes in work patterns, and weakened social relations among the community. As a result, many farmers and their families who previously depended on pineapple farming lost their livelihoods and experienced a decline in welfare, both materially and morally. This change also led to increased social jealousy and distrust among community members, dividing the community and reducing the

spirit of mutual cooperation. The implications of this study suggest the need for more equitable policies in land management and commodity conversion to reduce social disparities and improve community welfare.

Keywords: *Acquisition, Land, Conversion, Commodity, Institution, Welfare*

Corresponding: Rizki Budi Utami
E-mail: rb.utami@gmail.com



PENDAHULUAN

Lahan memiliki definisi sebagai suatu hamparan yang terdapat di permukaan bumi secara vertikal yang mencakup berbagai komponen, seperti udara, tanah, air, batuan, vegetasi, serta berbagai aktivitas manusia pada masa lalu atau masa kini (Parwati et al., 2016; Wahyunto & Dariah, 2014). Berdasarkan definisi tersebut, lahan merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh setiap makhluk hidup terutama manusia untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan hidupnya (Ayu & Arnawati, 2022; Cahyani et al., 2021; Febriarta & Oktama, 2020; Hasanah et al., 2021). Banyak bentuk pemanfaatan lahan yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, salah satunya adalah pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian. Pertanian yang dimaksud disini adalah pertanian dalam arti luas, seperti yang dituliskan oleh Krisnamurthi, pertanian adalah kegiatan yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan (Rachmadian et al., 2021; Setiawan et al., 2018; Undra, 2019; Woy et al., 2019).

Saat ini Indonesia memiliki jumlah lahan pertanian seluas 70 juta hektar pada tahun 2011. Lahan pertanian tersebut mencakup lahan untuk pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Melihat besarnya luas lahan pertanian di Indonesia, maka dapat dibayangkan banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Menggantungkan hidup pada lahan pertanian tidak hanya dilakukan oleh petani, tetapi juga orang yang tidak disebut sebagai petani, seperti pemberi pinjaman modal, tengkulak, pembeli hasil pertanian, penyedia saprotan, dan sebagainya. Selain itu, hasil lahan pertanian pun sangat dibutuhkan oleh banyak orang di belahan dunia manapun sebagai bahan untuk menunjang kehidupan mereka, yang salah satunya adalah sebagai bahan makanan. Pernyataan tersebut memberikan sebuah gagasan bahwa pertanian mengalir di dalam setiap darah manusia, karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak makan makanan yang berasal dari hasil pertanian. Sebidang lahan pertanian dapat melibatkan beberapa aktor, diantaranya petani pemilik, petani pengelola, buruh tani, pihak pemberi modal, pihak penjual saprotan (sarana produksi pertanian), pihak pembeli hasil pertanian, dan sebagainya. Hubungan antar aktor-aktor tersebut membentuk sebuah mekanisme yang tercipta seiring berjalannya waktu. Mekanisme itu dapat dikatakan sebagai sistem usaha tani. Kata sistem merujuk pada rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Di dalam sebuah sistem usaha tani, terdapat aturan-aturan, pola, nilai, dan tata cara yang mengatur antar aktor bagaimana mereka harus bertindak laku atau melakukan perbuatan. Aturan, pola, nilai, dan tata cara tersebut dapat dikatakan

sebagai sebuah pranata sosial atau kelembagaan. Pranata sosial mengatur bagaimana antar aktor atau pihak yang terkait dalam sistem tersebut berinteraksi saat dengan lainnya.

Ketidakteraturan akan terjadi yang menyebabkan sendi-sendi kehidupan lainnya akan terganggu. Lahan pertanian selain memiliki seperangkat pranata juga memiliki beragam permasalahan yang melanda. Saat ini lahan pertanian diancam oleh maraknya kasus perampasan tanah yang dilakukan oleh berbagai pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Perampasan tanah atau yang biasa disebut sebagai *land grabbing* biasanya terjadi pada tanah yang menjadi kemelut di antara dua pihak atau lebih. Para pihak perampas tanah melakukan kegiatan perampasan atas dasar tujuan yang dianggap menguntungkan bagi dirinya. Tujuan perampasan tanah ini adalah untuk mengonversi lahan-lahan dari suatu fungsi ke fungsi lainnya. Ada 2 bentuk konversi lahan yang dilakukan oleh perampas lahan. Pengonversian lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dapat dikatakan sebagai konversi lahan yang bersifat permanen. Sedangkan konversi lahan pertanian menjadi bentuk lahan pertanian lain disebut sebagai konversi yang sifatnya sementara. Konversi yang bersifat sementara terjadi jika pemilik lahan atau penggarap lahan pertanian mengganti komoditi yang diusahakan pada lahan tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, selanjutnya konversi lahan yang bersifat sementara dapat dikatakan sebagai konversi tanaman komoditi.

Satu hal yang harus kita ketahui mengenai pranata atau kelembagaan adalah jika terjadi sedikit saja gangguan atau perubahan kecil pada kehidupan yang mengandung pranata, maka akan mengubah pranata tersebut. Pergantian tanaman komoditi pada kasus konversi tanaman komoditi dapat menciptakan pranata baru. Hal tersebut secara otomatis akan terjadi karena pranata baru akan kembali menciptakan kondisi keseimbangan yang harmonis. Pranata yang berubah ini dapat berupa pranata pada ketenagakerjaan, peraturan pemilik dan pengelola lahan, dan lain-lain.

Fungsi pranata adalah mengatur kehidupan manusia dalam setiap kegiatan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Ketika pranata mengalami perubahan, maka akan menimbulkan efek domino pada kehidupan seseorang. Dikatakan efek domino karena pranata akan mengubah tatanan kehidupan seseorang yang telah terbentuk sejak ia lahir hingga saat pranata tersebut mengalami perubahan. Jika perubahan pranata sistem usaha tani ini menguntungkan, maka perubahan yang terjadi adalah perubahan positif, dan sebaliknya. Pada seseorang yang terlibat dan menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian, terutama petani, perubahan pranata pertanian dapat mengubah pola pekerjaan yang dilakukannya, keadaan keluarganya, kondisi sosial dengan pelaku usaha pertanian, dan sebagainya. Pada akhirnya, perubahan-perubahan tatanan kehidupan tersebut akan berdampak pada kesejahteraan petani. Terdapat dua kemungkinan perubahan kesejahteraan akibat berubahnya pranata, yakni kesejahteraan dapat meningkat atau kesejahteraan menurun.

Latar belakang yang dituliskan sebelumnya terjadi di Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di desa ini telah terjadi konversi tanaman komoditi dari tanaman nanas ke tanaman kelapa sawit. Pergantian komoditi ini bermula dari adanya klaim PT. Nagasawit (bukan nama sebenarnya) atas lahan yang telah bertahun-tahun diusahakan oleh masyarakat Kumpay. Kasus perebutan hak atas tanah ini berakhir ketika PT. Nagasawit membabat habis seluruh kebun nanas milik warga dan menggantinya dengan kelapa sawit. Pergantian tanaman ini membuat adanya pranata-pranata pertanian baru yang berlaku yang pada akhirnya membuat hampir seluruh petani nanas kehilangan mata pencaharian. Pihak-pihak yang tersingkir ini secara perlahan-lahan mengalami perubahan dalam kehidupannya, salah satunya adalah perubahan sistem

Dampak Perubahan Pranata Sosial terhadap Kesejahteraan Petani (Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi)

mata pencaharian yang mereka lakukan. Perubahan-perubahan tersebut berdampak pada perubahan kesejahteraan yang dirasakan oleh para pihak yang tersingkir. Oleh karena itu, sangat diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana perubahan pranata pertanian akibat konversi tanaman komoditi, bagaimana dampak perubahan pranata pertanian pada kehidupan petani selaku aktor utama pertanian, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan yang mereka rasakan pada saat ini.

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang bahwa pranata sosial merupakan hal yang ada dalam setiap interaksi kehidupan. Salah satu kegiatan manusia yang memiliki pranata yang khas adalah kegiatan pertanian. Pranata dalam kegiatan pertanian dapat berupa aturan tentang sistem kepemilikan lahan, hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap, hubungan antara petani dengan lembaga pemberi bantuan modal, penjual saprotan, dan pemerintah, serta penggunaan tenaga kerja, dan sebagainya.

Perubahan pranata sosial dalam sebuah sistem kehidupan dapat dipengaruhi dari dalam atau luar sistem yang menjadi tempat pranata tersebut berada. Faktor perubahan pranata sosial yang berasal dari dalam berupa perubahan dalam interaksi individu-individu yang terlibat di dalam pranata tersebut (Nandang Rusnandar et al., 2017; Sholeh et al., 2022; Sulaswari & Hardati, 2022; Wardiat, 2016). Sedangkan faktor luar berupa intervensi atau campur tangan pihak luar sistem dimana pranata berada, misalnya pemerintah, swasta, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan berubahnya pranata sosial atau kelembagaan, maka akan mengubah aspek lain dalam kehidupan pelaku pranata, seperti pola pekerjaan, kesempatan kerja, dan hubungan antar masyarakat. Perubahan tatanan kehidupan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Terdapat dua kemungkinan perubahan kesejahteraan yang diakibatkan oleh berubahnya pranata sosial, yaitu kesejahteraan dapat meningkat atau kesejahteraan dapat menurun.

Perubahan konversi tanaman komoditi di Desa Kumpay, Subang, dari tanaman nanas menjadi kelapa sawit telah menyebabkan dampak signifikan terhadap kehidupan petani setempat. Pergantian komoditi ini mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi di desa tersebut, di mana banyak petani kehilangan mata pencaharian mereka setelah kebun nanas mereka dibabat. Perubahan ini juga mengganggu pranata sosial pertanian yang telah terbentuk, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial antara petani yang bertahan dan mereka yang terpinggirkan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani adalah berkurangnya kesempatan kerja dan perubahan dalam pola pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan pertanian tanaman musiman (nanas) menjadi tanaman tahunan (kelapa sawit), yang membutuhkan sedikit tenaga kerja.

Selain itu, dampak lebih lanjut dari konversi tanaman ini adalah berkurangnya akses petani terhadap sumber daya, serta ketidakpastian sosial yang muncul akibat ketidaksetaraan distribusi hasil komoditas baru. Seiring dengan itu, banyak petani yang terlibat dalam usaha tani lainnya dan mengalami penurunan kesejahteraan baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih dalam tentang perubahan pranata sosial akibat konversi tanaman komoditi dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat konversi lahan yang terjadi di Desa Kumpay, Subang, tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi petani tetapi juga pada kehidupan sosial mereka. Proses konversi ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan hubungan sosial antar warga desa. Mengingat pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan banyak pihak, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana konversi tanaman komoditi memengaruhi pranata sosial dan kesejahteraan, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi sosial-ekonomi yang muncul.

Penelitian oleh Ruswandi mengenai dampak konversi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani di Bandung Utara menunjukkan bahwa konversi lahan dapat menyebabkan perubahan besar dalam pola pekerjaan dan penghasilan petani, meskipun dampak sosialnya tidak begitu terlihat. Sebuah studi oleh Syahza dan Khaswarina lebih menekankan pada kesejahteraan petani dalam konversi perkebunan kelapa sawit di Riau, namun tidak menggali lebih dalam dampak sosial yang timbul. Sementara itu, Hamdan juga mengkaji konversi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit, dengan fokus pada aspek ekonomi, namun lebih sedikit memperhatikan perubahan pranata sosial dan hubungan antar petani.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan gambaran tentang dampak konversi tanaman terhadap kesejahteraan petani, banyak yang masih kurang menekankan perubahan dalam pranata sosial pertanian serta dampaknya terhadap hubungan sosial antar warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji tidak hanya perubahan dalam struktur pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi petani, tetapi juga dampaknya terhadap kohesi sosial di tingkat komunitas yang terlibat dalam konversi komoditi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji hubungan langsung antara perubahan pranata sosial pertanian dan perubahan kesejahteraan petani setelah konversi tanaman komoditi dari nanas ke kelapa sawit. Tidak hanya menilai dampak ekonomi dari konversi, tetapi juga menggali aspek sosial yang lebih luas, termasuk perubahan dalam pola hubungan antar warga, rasa kepercayaan, dan kecemburuan sosial yang muncul sebagai akibat dari konversi tersebut. Penelitian ini juga memperkenalkan pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak tersebut.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan pranata sosial akibat konversi tanaman komoditi terhadap kesejahteraan petani di Desa Kumpay. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konversi tanaman dari nanas ke kelapa sawit mempengaruhi struktur sosial, hubungan antar petani, serta kesejahteraan mereka secara materiil dan moril. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif konversi terhadap masyarakat.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai dampak sosial-ekonomi dari konversi tanaman komoditi pada masyarakat pertanian, khususnya petani di Desa Kumpay. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana dalam pengelolaan lahan dan konversi komoditi, guna meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas sosial di tingkat komunitas. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami dinamika sosial yang terjadi akibat perubahan pranata pertanian, sehingga dapat merancang langkah-langkah adaptasi yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Dampak Perubahan Pranata Sosial terhadap Kesejahteraan Petani (Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi)

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui uji hipotesis. Variabel utama yang diteliti meliputi perubahan pranata sosial pertanian dari komoditi nanas ke kelapa sawit, perubahan hubungan antar warga, sistem mata pencaharian, serta kesejahteraan petani. Variabel independen adalah perubahan pranata sosial pertanian, sementara variabel dependen mencakup hubungan antar warga dan kesejahteraan petani. Perubahan sistem mata pencaharian berfungsi sebagai variabel perantara.

Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif mengeksplorasi dampak perubahan pranata pertanian terhadap hubungan sosial dan kesejahteraan moral, sedangkan metode kuantitatif menganalisis perubahan sistem mata pencaharian dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi petani. Instrumen kuantitatif menggunakan kuesioner, sedangkan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Penelitian dilakukan di Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dengan pemilihan lokasi berdasarkan konversi komoditi yang terjadi pada tahun 2007 dan masih dalam ingatan kolektif masyarakat. Penelitian berlangsung dari Februari hingga Juni 2013. Informan terdiri dari petugas kecamatan, aparat desa, tokoh masyarakat, serta mantan mandor lahan kelapa sawit. Responden penelitian adalah 30 kepala rumah tangga petani yang menjadi korban sengketa lahan, dipilih secara acak sederhana.

Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder dari dokumen terkait. Data kualitatif dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2007 dan PASW Statistics 18, dengan teknik tabulasi silang dan korelasi Rank Spearman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sengketa Lahan: Sejarah Kepemilikan Dan Penguasaan Lahan Hingga Konversi Tanaman Komoditi Sejarah Panjang Kepemilikan, Penguasaan, dan Garapan Lahan *Eks-HGU* PT. Nagasawit

Di dalam kehidupan manusia, sebidang lahan selalu terkait dengan setiap tindak tanduk tingkah laku manusia. Lahan adalah tempat bagi semua manusia untuk memulai, menjalani, dan mengakhiri kehidupannya. Atas kodrat tersebut lahan selalu dibutuhkan oleh setiap manusia. Kebutuhan akan lahan berbanding lurus dengan peningkatan penduduk. Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa saat ini seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan lahan semakin meningkat. Namun, permasalahannya terletak pada lahan merupakan sumber daya yang sulit untuk diperbaharui. Keterbatasan jumlah lahan membuat manusia harus berusaha keras untuk mendapatkan hak atas sebidang lahan. Tak jarang usaha keras tersebut berujung pada konflik antar sesama manusia. Melihat betapa pentingnya lahan, maka diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dengan tanah dan manusia dengan manusia di atas sebuah tanah. Kaidah-kaidah tersebut dapat memberikan penjelasan mengenai masalah kepemilikan dan penguasaan lahan.

Berbicara mengenai siapakah yang memiliki dan menguasai sebuah lahan, maka harus ditelusuri dahulu bagaimanakah sejarah panjang dari lahan tersebut. Terlebih jika lahan yang dibicarakan adalah lahan sengketa, seperti yang terdapat di Desa Kumpay, Subang. Di desa ini, terjadi kasus sengketa lahan pertanian antara masyarakat dengan PT. Nagasawit. Sengketa lahan ini memperebutkan hak penguasaan atas sebuah lahan seluas 300 hektar. Dengan mengetahui sejarah lahan ini, kita juga akan mengetahui siapakah pihak yang memiliki hak atas tanah ini.

Tanah sengketa seluas 300 hektar yang terdapat di Desa Kumpay, atau yang biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai tanah eks-HGU PT. Nagasawit, awalnya termasuk ke dalam tanah *eigendom verponding*. Tanah *eigendom verponding* adalah tanah yang pada saat masa penjajahan Belanda merupakan tanah milik pribumi yang digunakan untuk perkebunan kolonial. Klaim atas tanah *verponding* ini dibuktikan dengan adanya surat-surat kepemilikan atas nama Nyi Mas Enjteh, yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Subang No. 16-17-18 dan 21/PDT-P/2006.

Pada tahun 1978, karena tanah ini belum jelas asal-usul kepemilikannya, maka oleh pemerintah Indonesia tanah ini di Hak Guna Usaha-kan kepada PTP 10 yang saat ini bernama PT. Nagasawit. Tanah yang diberikan HGU kepada PT. Nagasawit seluas 1,911 hektar. Pemberian HGU dilakukan demi keperluan perkebunan teh. Pada saat yang sama, yakni awal-awal masa pemberian HGU, pihak PT. Nagasawit telah menelantarkan lahan tersebut sebesar 30% tanpa alasan yang jelas.

Tahun demi tahun berlalu, penelantaran lahan tersebut oleh PT. Nagasawit semakin menjadi. Akibat dari penelantaran, lahan-lahan tersebut menjadi semak belukar yang dihuni oleh binatang-binatang liar, seperti babi hutan, ular, dan lain-lain. Semenjak tahun 1978, memang terdapat segelintir orang yang telah mencoba memanfaatkan lahan tersebut. Namun jumlahnya hanya sedikit dan dapat dihitung dengan jari.

Hingga pada tahun 1998, ketika krisis moneter melanda bangsa Indonesia, atas inisiatif beberapa warga, maka lahan yang ditelantarkan tersebut diajukan agar menjadi garapan warga setempat. Mereka mengajukan permohonan pemanfaatan lahan kepada Bupati Subang dengan diketahui oleh Kepala Desa Kumpay, dengan nomor surat 02/AM/UM/98. Kemudian, surat tersebut ditanggapi oleh Bupati Subang dengan cara melanjutkan surat tersebut atau menyurati direksi PT. Nagasawit dengan nomor surat 593/1047/Tapem tanggal 4 Juli 1998. Selanjutnya, direksi PT. Nagasawit menerima baik itikad masyarakat dengan menerbitkan 3 buah surat, yakni surat tentang pemanfaatan lahan tidur (No. SB/D. IV/2642/VII/1998), pinjam pakai untuk tanaman semusim (No. SB/D. III/4169/X/1999), dan penggarapan tanah perkebunan Tambaksari dan adanya PBB dan kompensasi yang harus dibayar oleh penggarap (No. D. IV/TAS/212/VII/98). Setelah penerbitan surat tersebut, kemudian dibuatlah surat perjanjian antara PT. Nagasawit dengan masing-masing ketua kelompok tani.

Setelah surat tersebut diterima mulailah warga Kumpay menggarap lahan tersebut. Petani yang menggarap pada saat itu sekitar 700 kepala keluarga. Awal mula penggarapan tersebut, petani menanaminya dengan tanaman semusim sesuai perjanjian, seperti kacang tanah, padi, jagung, singkong, ubi, dan sebagainya. Petani pun membayar uang PBB dan

kompensasi atau yang disebut petani uang sewa lahan yang berkisar antara Rp30 hingga Rp50.4 per meter persegi per tahun.

Pada tahun 2000, PT. Nagasawit mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha lahan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian, pada tahun 2001 BPN menyatakan bahwa tidak ada masa perpanjangan Hak Guna Usaha lahan tersebut. Pada saat itu PT. Nagasawit tidak melakukan upaya-upaya hukum untuk memperpanjang masa HGU lahan tersebut. PT. Nagasawit seperti menerima keputusan BPN. Waktu pun berlalu, hingga sampai pada tahun 2003, dimana resmi PT. Nagasawit tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka petani penggarap pun mulai berhenti membayar uang sewa lahan kepada PT. Nagasawit, karena dengan berakhirnya HGU yang dimiliki PT. Nagasawit, maka berakhir pula perjanjian petani dengan PT. Nagasawit. Kemudian, pada saat yang sama penggarap pun mulai mengganti komoditinya menjadi tanaman tahunan. Tanaman tahunan tersebut adalah nanas, pisang, dan kayu olahan. Namun, mayoritas tanaman yang ditanam adalah nanas. Pemilihan nanas adalah karena nilai jual nanas lebih tinggi daripada tanaman lainnya. Akibat hal tersebut adalah Kecamatan Jalancagak terkenal sebagai penghasil nanas terbesar di Subang, dan Subang terkenal sebagai daerah asli penghasil nanas madu. Bukti dari hal ini adalah dengan dibangunnya tugu nanas yang letaknya berada di simpangan Jalan raya Jalancagak.

Program Kelapa Sawit Masuk Jawa: Kebijakan Sepihak PT. Nagasawit

Kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan yang sedang “naik daun” di dunia. Tanaman yang biasa disebut sebagai raja tanaman karena ketidaktoleransiannya terhadap tanaman lain yang hidup didekatnya, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Melihat potensi itu Indonesia sebagai negara tropis terus mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Saat ini banyak perusahaan-perusahaan perkebunan entah itu negeri maupun swasta berlomba-lomba mengembangkan usaha kelapa sawit. Akibatnya, para perusahaan tersebut terus mencari lahan-lahan yang sesuai untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT. Nagasawit yang memiliki program pengembangan kelapa sawit di Pulau Jawa. Lahan yang diincar oleh PT. Nagasawit ini salah satunya berada di Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Waktu silih berganti, kehidupan petani penggarap Desa Kumpay mulai harmonis. Kesejahteraan mereka mulai terlihat dan mereka memiliki kehidupan yang stabil. Kemudian, pada tahun 2007 tersiar kabar bahwa PT. Nagasawit akan menanami lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit. Kabar tersebut menjadi nyata, setelah pada tanggal 17 Februari 2007, Camat Jalancagak menerima sebuah surat dari PT. Nagasawit mengenai rencana perusahaan perkebunan yang akan menanami kelapa sawit pada lahan yang digarap oleh petani, dan meminta camat melakukan sosialisasi kepada penggarap. Tanpa diduga pihak kecamatan pun seperti memberikan restu kepada PT. Nagasawit dengan mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh desa di Kecamatan Jalancagak, untuk melaksanakan sosialisasi tersebut, dengan nomor surat SB/TAS. 148/II/2007.

Petani penggarap pun tidak mengetahui apa alasan PT. Nagasawit melakukan hal tersebut. Fakta yang diketahui oleh penggarap adalah PT. Nagasawit tidak lagi memiliki HGU atas lahan tersebut, yang artinya PT. Nagasawit tidak memiliki hak untuk menanam lahan tersebut. Namun, pertanyaan para penggarap hilang seiring dengan tindakan pembabatan yang dilakukan oleh PT. Nagasawit.

Aksi-Reaksi Petani Penggarap

Suatu pagi di bulan Juli 2007, tepatnya tanggal 16 Juli 2007, menjadi saat yang tidak akan pernah dilupakan oleh petani penggarap lahan sengketa atau lahan eks-HGU PT. Nagasawit. Mereka ingat pada tanggal itu adalah tanggal dimulainya kemunduran dalam hidup mereka. Masih jelas dalam ingatan mereka bagaimana pihak PT. Nagasawit melakukan pembabatan. Pada saat itu PT. Nagasawit memberikan perintah kepada mandor kebun dan beberapa karyawan untuk membat habis lahan yang digarap petani. Kedatangan karyawan PT. Nagasawit tidak sendiri, mereka dibekali oleh ratusan orang anggota keamanan yang bersenjata lengkap. Aksi pembabatan yang dilakukan pihak PT. Nagasawit membuat masyarakat sedih sekaligus geram. Pasalnya, tanaman-tanaman nanas tersebut dalam waktu beberapa bulan lagi akan dipanen. Para penggarap telah membayangkan keuntungan yang akan mereka terima karena waktu panen yang dinanti bertepatan dengan bulan puasa. Selain itu, pembabatan dilakukan tanpa adanya pemberitahuan secara langsung kepada penggarap. Sikap PT. Nagasawit yang dinilai arogan oleh penggarap ini sangat disayangkan oleh penggarap. Menurut mereka, seharusnya PT. Nagasawit mengajak mereka musyawarah terlebih dahulu. Masyarakat tidak hanya diam menjadi saksi bisu atas aksi pembabatan yang dilakukan orang-orang PT. Nagasawit. Mereka melakukan perlawanan dengan seluruh kemampuan mereka. Mereka berusaha menghadang petugas PTPN dan keamanan. Mereka dengan berani menghadang alat-alat berat yang digunakan petugas, seperti bulldozer. Namun, perlawanan mereka berujung pada kekecewaan. Meskipun petani penggarap secara jumlah lebih banyak daripada orang-orang yang diperintahkan PT. Nagasawit, mereka mengalami kekalahan. Hal tersebut disebabkan pihak keamanan yang menyertai karyawan PT. Nagasawit, membawa persenjataan. Bahkan beberapa petani ada yang mendapatkan tindakan penganiayaan oleh pihak keamanan tersebut. Ujung dari perlawanan mereka adalah habisnya seluruh tanaman nanas yang ditanam oleh petani penggarap. Sikap petani yang akhirnya pasrah menerima kenyataan lahan mereka dibabat, bukan berarti menerima. Para petani penggarap ini tetap tidak bisa menerima perlakuan pihak PT. Nagasawit. Mereka tidak habis pikir mengapa PTPN tidak memikirkan nasib mereka. Padahal mereka mengaku selalu membayar uang sewa lahan kepada PT. Nagasawit. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak AB. Pada awalnya, masyarakat sebenarnya ingin melawan PT. Nagasawit dengan jalan kekerasan. Petani penggarap berpikir hanya itulah yang dapat mereka lakukan. Dalam kondisi yang genting tersebut munculah sosok *opinion leader* dalam masyarakat. Sosok *opinion leader* ini bukanlah pemimpin desa. Beliau juga sama seperti yang lainnya, yakni seorang petani penggarap. Beliau juga tidak mengenyam pendidikan bangku kuliah. Modal beliau adalah berani

mengutarakan apa yang ada di isi hatinya dan isi hati petani penggarap. Akhirnya, dengan ide beliau dan beberapa orang, terbentuklah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak petani penggarap. LSM ini kemudian diberi nama Himpunan Petani Nanas (HPN).

Pranata Nanas Dan Pranata Kelapa Sawit

Pranata Sosial Pertanian Komoditi Nanas: Pranata yang Merangkul Banyak Pihak

Subang, merupakan sebuah daerah yang terkenal akan komoditi nanas. Nanas Subang biasa disebut oleh masyarakat sebagai nanas madu atau “si madu”. Nanas madu ini dapat dikatakan sebagai tanaman endemik karena hanya tumbuh di daerah Subang yang daerah produksi terbanyak berada di Jalancagak. Tak jauh berbeda dengan usaha tani tanaman lainnya, kegiatan usaha tani nanas terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Untuk kegiatan pembibitan, biasanya hanya dilakukan oleh penggarap sendiri. Untuk kegiatan penanaman, penggarap biasanya mempekerjakan petani laki-laki penggarap lainnya. Sedangkan, kegiatan peran perempuan, atau istri penggarap, terlihat pada kegiatan pemeliharaan. Mereka membantu suami-suami mereka atau bekerja pada lahan garapan orang lain. Para perempuan ini biasanya mencabut rumput yang tumbuh atau ngored jika disebut oleh masyarakat Kumpay dan merapikan jalur tumbuh tanaman nanas agar tetap lurus.

Saat panen adalah saat bagi seorang penggarap dapat mempekerjakan anak-anak kecil untuk mengangkut hasil panen mereka. Tak hanya sampai itu saja, saat panen seorang penggarap dapat menjadi bandar nanas. Bandar nanas adalah seseorang yang membeli nanas-nanas milik petani penggarap untuk kemudian ia jual kepada pedagang-pedangan buah besar atau kecil. Seorang penggarap dapat menjadi bandar nanas jika ia memiliki banyak modal uang dan jejaring yang luas. Kepemilikan jejaring bertujuan agar banyak petani penggarap yang mau menjual nanas hasil produksinya kepada dirinya. Bandar nanas akan mempekerjakan penggarap lainnya sebagai kuli pikul nanas ke truk atau mobil milik mereka atau kuli timbang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pranata pertanian nanas di Desa Kumpay lebih mengatur pada penggunaan tenaga kerja. Upah yang diberikan untuk pekerja yang terlibat dalam usaha tani nanas berbeda, sesuai dengan usia. Orang dewasa yang bekerja sebagai buruh tani, kuli pikul atau kuli timbang (saat panen) akan diberikan upah sebesar Rp15.000/hari. Anak-anak akan diberikan upah sebesar Rp 5.000 atas jasanya membantu penggarap mengangkut hasil panen mereka.

Penggunaan tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tenaga kerja keluarga dan non-keluarga. Ada petani yang hanya mempekerjakan keluarga mereka, ada yang mempekerjakan keluarga dan non-keluarga, dan ada yang tidak mempekerjakan keluarga namun mempekerjakan non-keluarga. Alasan perbedaan tersebut disebabkan beberapa faktor, seperti luas lahan yang digarap tidak terlalu besar dan tidak terdapatnya anggota keluarga untuk dipekerjakan.

Pranata Sosial Pertanian Komoditi Sawit: Pranata yang ‘Menyingkirkan’ Banyak Pihak

Bergantinya tanaman pada lahan sengketa, membuat para aktor pertanian yang terkait dengan lahan tersebut harus menyesuaikan diri. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan pranata pertanian tanaman kelapa sawit. Celakanya, kelembagaan pertanian untuk komoditi sawit sangat berbeda 180 derajat dengan kelembagaan pertanian komoditi nanas. Ibarat dua sisi mata uang, pranata sosial pertanian kedua komoditi ini sangat berbeda. Jika pada komoditi nanas kelembagaan pertaniannya dapat menyerap banyak tenaga kerja, maka kelembagaan pada kelapa sawit tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena tanaman kelapa sawit adalah tipe tanaman yang dapat tumbuh besar tanpa perlunya perhatian khusus seperti nanas. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kelapa sawit setelah ditanam hanya untuk memberikan obat-obatan dan panen saja.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dibayangkan dari seluruh lahan yang diambil alih oleh PT. Nagasawit, maka jumlah buruh tani yang dipakai hanya sedikit. Selain itu, memang tanaman kelapa sawit tidak membutuhkan perlakuan dan pemeliharaan khusus. Tanaman ini ketika baru ditanam tinggal dibiarkan saja hingga berumur 5 tahun untuk masa panen pertama. Padahal, pada awal masa- masa pembabatan, kepada pemerintah PT. Nagasawit menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun pada akhirnya akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Menguntungkan karena dapat menyerap tenaga kerja dan tenaga kerja yang digunakan hanya warga desa di sekitar lahan tersebut. Pada kenyataannya, omongan tersebut hanya bualan belaka, warga tidak mendapatkan kesempatan bekerja menjadi buruh sawit. Orang-orang yang mendapatkan pekerjaan menjadi buruh sawit hanyalah segelintir orang. Orang yang bisa mendapatkan pekerjaan menjadi buruh sawit adalah saudara atau kenalan dekat dari orang yang bekerja di PT. Nagasawit. konversi tanaman komoditi telah mengubah pranata pertanian yang ada. Perubahan ini menyebabkan banyak pihak yang tersingkir dari lahan garapan tersebut. Mereka tersingkir dan kehilangan mata pencahariannya. Petani laki-laki, istri-istri petani, buruh tani, anak-anak, dan bandar nanas kehilangan sumber pendapatannya.

Dampak Perubahan Pranata Sosial Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Perubahan Hubungan antar Warga: Konsekuensi yang Terbentuk Akibat Perubahan Pranata Sosial Pertanian dan Sistem Mata Pencaharian

Pranata usaha tani nanas telah membuat kehidupan harmonis tercipta di dalam masyarakat. Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa petani penggarap dapat bekerja menjadi buruh tani di lahan garapan petani lainnya. Hal tersebut juga berlaku bagi istri penggarap yang bekerja sebagai buruh tani, tidak hanya bekerja di lahan garapan suaminya, namun juga bekerja di lahan garapan milik orang lain. Tak hanya itu saja, penggarap yang menjadi bandar nanas juga memiliki banyak hubungan baik kepada petani penggarap. Hal tersebut membuat terciptanya kondisi kenyamanan dalam berhubungan dengan terciptanya jejaring-jejaring kerja. Gotong royong pun menjadi hal

Dampak Perubahan Pranata Sosial terhadap Kesejahteraan Petani (Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi)

yang biasa dilakukan antara sesama penggarap ketika mereka membutuhkan sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama, seperti perbaikan jalan menuju lahan garapan.

Selain jejaring kerja dan gotong royong, hal lain yang terbentuk adalah kepercayaan. Saat itu seorang bandar nanas, yang merupakan seseorang yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih, menjadi seseorang yang dapat diandalkan untuk memberikan hutang bagi para penggarap. Bandar nanas dapat memberikan pinjaman bagi mereka yang memiliki kebutuhan mendesak, seperti untuk modal, uang sekolah, kesehatan, atau renovasi rumah. Saat itu bandar nanas tidak merasa takut untuk memberikan pinjaman karena meyakini bahwa petani penggarap yang meminjam akan mengembalikan uang mereka. Keyakinan itu didapat karena bandar nanas mengetahui bahwa seorang penggarap akan mampu mengembalikan karena pekerjaan usaha tani nanas menjanjikan secara finansial. Bandar nanas mengetahui dengan pasti penggarap akan mengembalikan uang pinjaman dengan uang yang didapat dari hasil panen.

Namun, kemudahan untuk meminjam dan memberi pinjaman tidak lagi terasa saat ini. Beberapa orang responden mengakui saat ini mereka sulit memberikan pinjaman atau meminjam sejumlah uang. Pengakuan tersebut diungkapkan responden yang merupakan mantan penggarap yang juga menjadi bandar nanas, Bapak SN. Bapak SN menyatakan bahwa meskipun ia saat ini dapat dikatakan memiliki uang yang lebih daripada yang lain, namun ia tidak berani memberikan pinjaman karena tidak percaya yang meminjam akan membayar hutangnya. Keadaan tersebut terasa masuk akal karena ketidakpercayaan itu tumbuh akibat mereka sama-sama mengetahui bahwa kini mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Tidak memiliki pekerjaan berarti tidak ada jaminan bagi mereka dapat melunasi pinjaman dengan lancar seperti dulu. Alasan lain adalah mereka menyadari bahwa sesama mereka, tetangga-tetangga mereka juga sama-sama susah akibat tidak lagi menjadi penggarap. Hilangnya kepercayaan antar warga yang telah dijelaskan tersebut lebih disebabkan oleh perubahan sistem mata pencaharian yang telah terjadi di masyarakat.

Selain rasa ketidakpercayaan yang cenderung memudar, hal lain yang dapat terindikasi adalah munculnya rasa saling curiga antar warga. Kecurigaan ini terbentuk seiring dengan munculnya kasus-kasus warga yang kehilangan benda-benda berharga di rumahnya. Walaupun yang kehilangan tidak menuduh secara langsung, namun ada indikasi di antara mereka curiga bahwa ada warga di dalam desa yang melakukannya. Mereka menduga bahwa masalah kriminalitas ini ada kaitannya dengan kondisi kesejahteraan warga yang terus menurun setelah peristiwa pembabatan.

Kecemburuan sosial juga menjadi hal yang terindikasi selanjutnya. Kecemburuan sosial ini terjadi di antara penggarap yang tersingkir dengan penggarap yang kini masih bekerja menjadi buruh kelapa sawit. Mereka menganggap bahwa penggarap yang kini bekerja untuk PT. Nagasawit sama saja mengkhianati Kumpay. Kecemburuan jelas terjadi disini karena tidak semua penggarap mendapatkan pekerjaan di lahan kelapa sawit (Aldilal, 2020; Arimbi, 2022; JUHAD, 2021). Hanya segelintir orang saja yang dianggap memiliki hubungan kerabat dengan karyawan PT. Nagasawit yang dapat bekerja. Dari

semua perubahan-perubahan hubungan sosial masyarakat tersebut, yang paling terasa perubahannya adalah adanya ketidakselarasan hubungan antara LSM pejuang nasib penggarap dengan pemerintah desa. Ketidakselarasan ini terasa dengan berbedanya keterangan mengenai informasi yang disampaikan oleh LSM dengan pemerintah desa. Kondisi ini menyebabkan penggarap yang dekat dengan lingkungan pemerintah desa menjadi seperti kurang menyukai keberadaan LSM. Begitu pun sebaliknya dengan penggarap yang dekat dengan lingkungan LSM.

Kondisi perubahan hubungan antar warga telah membuat warga merasa tidak bahagia. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan warga lain. Antar warga saling curiga, saling cemburu, hingga terpecah menjadi 2 kubu merupakan hal yang tidak diinginkan oleh warga Kumpay. Keadaan tersebut membuat mereka menjadi tidak nyaman jika harus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Hal itulah yang membuat mereka tidak sejahtera secara moril. Kesejahteraan moril yang dibahas pada bagian ini adalah kesejahteraan yang dirasakan secara moril yang berkaitan dengan interaksi sosial antar manusia.

Perubahan Sistem Mata Pencaharian: Perubahan Langsung Akibat Perubahan Pranata Sosial Pertanian

Dampak sistem mata pencaharian adalah perubahan yang terjadi pada sistem mata pencaharian responden, yakni petani penggarap lahan eks-HGU PT. Nagasawit. Dampak sistem mata pencaharian dikategorikan menjadi dua, yakni perubahan pada kesempatan kerja dan perubahan pada pola pekerjaan. Berikut akan disajikan hasil dari analisis data dari masing-masing ukuran variabel.

Perubahan Kesempatan Kerja Pertanian dan *Non-Pertanian*

Dampak pada kesempatan kerja dapat didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada kesempatan responden untuk bekerja di wilayah Kumpay saat ini dibandingkan dengan saat sebelum terjadinya konversi tanaman komoditi. Kesempatan kerja ini berupa kesempatan kerja di bidang pertanian dan non-pertanian. Ukuran yang digunakan adalah persepsi dari masing-masing responden mengenai kesempatan kerja. Variabel ini terdiri dari satu pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban yaitu, sangat sulit, sulit, netral (tidak sulit dan tidak mudah), mudah, dan sangat mudah mengenai kesempatan bekerja di sektor pertanian dan non-pertanian.

Berubahnya Tingkat Kesejahteraan Akibat Perubahan Pranata Sosial Pertanian

Kehidupan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan. Pada umumnya kesejahteraan dijadikan oleh manusia sebagai tujuan atau pencapaian hidup mereka. Beragam cara dilakukan oleh manusia agar mencapai kesejahteraan secara hakiki, yaitu kesejahteraan moril dan materiil. Dibutuhkan waktu panjang agar kehidupan yang sejahtera dapat tercapai. Kesejahteraan yang dirasakan dapat ditentukan dari mata pencaharian yang mereka lakukan. Mata pencaharian menentukan jumlah penerimaan yang akan mereka dapatkan. Selain itu, jenis mata pencaharian juga menentukan jaminan

Dampak Perubahan Pranata Sosial terhadap Kesejahteraan Petani (Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi)

keamanan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat merasakan kesejahteraan moril (Setyawati et al., 2023; Sofyan & Warlina, 2017; Syukri & Mahmut, 2019).

Seperti yang telah sering disebutkan di atas, konversi tanaman komoditi pada akhirnya akan menyebabkan perubahan kesejahteraan. Awal dari perjalanan tersebut adalah permasalahan perampasan lahan karena klaim PT. Nagasawit atas lahan yang telah bertahun-tahun digarap 700 petani Kumpay. Kemudian, sengketa lahan tersebut berujung pada kekalahan para penggarap yang ditandai dengan pengambilalihan lahan dan ditanami oleh kelapa sawit. Kelapa sawit tanaman yang diharapkan dapat menjadi sumber penghidupan baru, ternyata tidak banyak menyerap tenaga kerja. Akibatnya petani penggarap yang berjumlah ratusan itu pun tersingkir dan mencari beragam pekerjaan baru. Namun pekerjaan baru itu tidak menjanjikan untuk kehidupan mereka. Sehingga pada akhirnya, tingkat kesejahteraan penggarap berubah.

Untuk mengetahui hubungan antara perubahan sistem mata pencaharian dengan tingkat kesejahteraan, dilakukan secara 7 tahap. Tahap pertama sampai ketiga adalah tahapan pada variabel perubahan sistem mata pencaharian. Tahap pertama adalah menjumlahkan skor pertanyaan kesempatan kerja di sektor pertanian dan non-pertanian sesudah terjadinya konversi tanaman komoditi. Kemudian, skor tersebut kembali dijumlahkan dengan pertanyaan pola pekerjaan responden saat ini. Jika ketiga pertanyaan tersebut dijumlahkan maka akan didapatkan skor tertinggi sebesar 15 dan terendah sebesar 3. Tahap kedua adalah mengkategorikan skor dari penjumlahan ketiga pertanyaan tersebut menjadi 3 kategori, yakni negatif (skor 6), netral (skor 7-11), dan tinggi (skor 12). Yang dimaksud netral apabila perubahan sistem mata pencaharian tidak negatif dan tidak positif. Tahap ketiga adalah menentukan responden yang termasuk ke dalam tiga kategori tersebut berdasarkan jawaban yang mereka pilih.

Tahap keempat sampai keenam adalah tahapan pada variabel tingkat kesejahteraan. Tahap ini secara garis besar seperti pada tahapan variabel perubahan sistem mata pencaharian. Tahap keempat menjumlahkan skor pertanyaan kesejahteraan moril responden sesudah konversi, yang terdiri dari 2 pertanyaan, dan pertanyaan kesejahteraan materiil responden sesudah konversi, yang terdiri dari 5 pertanyaan. Dari ketujuh pertanyaan tersebut didapatkan skor tertinggi sebesar 35 dan terendah sebesar 7. Tahap kelima adalah mengkategorikan skor tertinggi-terendah menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dikatakan rendah apabila skor 16, sedang apabila skor 17-25, dan tinggi apabila skor 26. Tahap keenam adalah menentukan responden yang termasuk ke dalam tiga kategori tersebut berdasarkan jawaban yang mereka pilih. Tahap terakhir atau tahap ketujuh merupakan tahap penghitungan hubungan antara variabel sistem mata pencaharian dengan tingkat kesejahteraan melalui aplikasi PASW *statistics* 18, dengan uji statistik *Rank Spearman*. Namun, sebelum penghitungan dilakukan, dibuat tabel tabulasi silang untuk melihat korelasi kedua variabel tersebut.

KESIMPULAN

Konversi tanaman komoditi dari nanas ke kelapa sawit di Desa Kumpay, Subang, telah menyebabkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani dan hubungan sosial masyarakat. Perubahan komoditi ini mengurangi jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian, menyebabkan ratusan penggarap kehilangan mata pencaharian dan beralih ke pekerjaan non-pertanian yang tidak bergaji tetap, yang berujung pada penurunan kesejahteraan secara moril dan materiil. Selain itu, konversi ini menurunkan rasa saling percaya, mengurangi semangat gotong royong, dan memunculkan kecemburuan sosial yang membagi masyarakat menjadi dua kubu. Untuk mengatasi dampak ini, disarankan agar kebijakan pengelolaan lahan lebih adil, dengan menyediakan pelatihan keterampilan bagi petani agar mereka dapat beralih ke pekerjaan yang lebih stabil, serta memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa lahan untuk menghindari kerugian bagi masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan dan pembangunan program berbasis masyarakat sangat penting untuk membangun kembali hubungan sosial yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan petani di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldilal, A. (2020). Prasangka Konflik & Kecemburuan Sosial Antara Pekerja China Dan Masyarakat Lokal DI PT. Virtue Dragon Nikel Industri Sulawesi Tenggara. *J-IKA*, 7(2). <https://doi.org/10.31294/kom.v7i2.9025>
- Arimbi, Y. D. (2022). Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat PKH di Dusun Pringroto Desa Punjung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 6(1). <https://doi.org/10.37859/jpumri.v6i1.3280>
- Ayu, H., & Arnawati, G. (2022). ... Sari Makmur Desa Pundungsari Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Masa Pandemi. *Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 01(02).
- Cahyani, A. A., Suharwanto, S., & Astuti, F. A. (2021). Evaluasi Kesesuaian Lahan Kawasan Geowisata Tebing Breksi di Dusun Nglengkong, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumian SATU BUMI*, 2(1). <https://doi.org/10.31315/psb.v2i1.4443>
- Febriarta, E., & Oktama, R. (2020). Pemetaan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Dan Air Bersih Di Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2). <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.283-289>
- Hasanah, F., Setiawan, I., Noor, T. I., & Yudha, E. P. (2021). Pemetaan Sebaran Tingkat Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Serang. *JURNAL AGRICA*, 14(2). <https://doi.org/10.31289/agrica.v14i2.5039>
- Juhad, H. Moh. J. (2021). Analisis Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Selong Lombok Timur. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 1(2). <https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i2.106>
- Nandang Rusnandar, Sulastri, S., & Achdiani, Y. (2017). Pranata Pendidikan. *Patanjala*, 9(1).
- Parwati, Widipaminto, A., Suwarsono, Zubaidah, A., Indrajat, A., & Salyasari, N. D. (2016). Informasi Titik Panas (Hotspot) Kebakaran Hutan/Lahan. *Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional*, vol.01.
- Rachmadian, R. H., Pitaloka, S. D., Nabailah, S., Dea, S., Yozha, T., Tanto, T., Wulandhari, W.,

Dampak Perubahan Pranata Sosial terhadap Kesejahteraan Petani
(Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi)

- Eka, Y., Asykurian, Z., Wagistina, S., & Deffinika, I. (2021). Kajian karakteristik petani dan potensi pemanfaatan lahan pertanian hortikultura Desa Sumber Brantas Kota Batu. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)*, 1(6). <https://doi.org/10.17977/um063v1i6p792-802>
- Setiawan, B., Yudono, P., & Waluyo, S. (2018). Evaluasi Tipe Pemanfaatan Lahan Pertanian dalam Upaya Mitigasi Kerusakan Lahan Di Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. *Vegetalika*, 7(2). <https://doi.org/10.22146/veg.35769>
- Setyawati, N., Imran, Z., & Yulianto, G. (2023). Potensi Dan Manfaat Ekosistem Mangrove Untuk Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Desa Karangsong. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 15(1). <https://doi.org/10.29244/jitkt.v15i1.36696>
- Sholeh, N. O. M., Agustina, E., & Sarwono, S. (2022). Kearifan Lokal Dalam Pranata Sosial Mangkal Luagh Pada Masyarakat Pasemah Di Bengkulu. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 6(1). <https://doi.org/10.33369/jik.v6i1.19737>
- Sofyan, I. M., & Warlina, L. (2017). Identifikasi Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Di Kelurahan Purwawinangun (Kabupaten Kuningan). *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 4(01). <https://doi.org/10.34010/jwk.v4i01.2116>
- Sulaswari, M., & Hardati, P. (2022). Dampak Perubahan Paradigma Pendidikan IPS Berbasis Islam Terapan Terhadap Pola Relasi, Struktur Sosial, Nilai, Norma, Pranata Sosial Di IAIN Kudus. *Jipis*, 31(1).
- Syukri, M., & Mahmut, C. (2019). Analisis Dimensi Mata Pencaharian Dan Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. *JEMMA / Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(1). <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i1.146>
- Undra, V. L. (2019). Identifikasi Pemanfaatan Lahan Pertanian Masyarakat Di Kecamatan Kontukowuna. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 4(2). <https://doi.org/10.36709/jppg.v4i2.6988>
- Wahyunto, & Dariah, A. (2014). Degradasi Lahan di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 8(2). <https://doi.org/10.2018/jsdl.v8i2.6470>
- Wardiat, D. (2016). Dinamika Nilai Gotong Royong Dalam Pranata Sosial Masyarakat Nelayan : Studi Kasus Masyarakat Bulutui Dan Pulau Nain , Sulawesi Utara. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(1).
- Woy, T. M., Tungka, A. E., & Takumansang, E. D. (2019). Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Airmadidi. *Jurnal Spasial*, 6(2).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)